

Perkembangan Sosial-Ekonomi Masyarakat Kolonis Jawa di Daerah Bagelen Lampung Pada Tahun 1905-1945

Oleh

Danu Ranu Setiawan¹, Ali Imron², Syaiful M³

FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung

E-mail: danusetiawan77@gmail.com HP. 089675002169

Received: November 30, 2018 Accepted: December 3, 2018 Online Published: December 4, 2018

Abstract: The Social-Economic Development Javanese Collony in Bagelen Region of Lampung During the Period of 1905-1945. *This study aims to find out about what type and the procces of the socio-economic development Javanese collony in Bagelen region Lampung during the period of 1905-1945. This study applied historical method with the data collecting techniques were done through library study and documentation. The data analysis technique was carried out using qualitative data analysis. The results obtained by the researcher showed the development of the Javanese collony in Bagelen region Lampung during the period 1905-1945 on the field of education, the development was shown by the establishment by Bagelen School, Beda School and HIS; various types of work began to run as well as in economic activities where people began to meet their consumption, the production and distribution the goods began to be done through the market and the community have started to cultivate their own land in the collony area.*

Keywords: *bagelen lampung, development, ethical politics, social economic*

Abstrak: Perkembangan Sosial-Ekonomi Masyarakat Kolonis Jawa di Daerah Bagelen Lampung Pada Tahun 1905-1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk dan proses perkembangan sosial-ekonomi yang terjadi pada masyarakat Kolonis Jawa di daerah Bagelen Lampung pada tahun 1905-1945. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode historis dengan teknik pengumpulan data kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil yang didapat peneliti mengenai perkembangan masyarakat kolonisasi jawa di daerah Bagelen Lampung pada tahun 1905-1945 pada tingkat pendidikan adanya Bagelen School, Beda School dan HIS, jenis pekerjaan yang mulai bervariasi serta pada aktivitas ekonomi yang mulai memenuhi kebutuhan konsumsi, produksi dan distribusi melalui pasar dan berkebun dari lahan kolonis sendiri.

Kata kunci: bagelen lampung, perkembangan, politik etis, sosial ekonomi

PENDAHULUAN

Penjajahan Belanda atas Indonesia bukan hanya membawa dampak buruk bagi mental maupun kehidupan rakyat Indonesia tetapi juga keadaan ekonomi yang tidak berkembang. Sejak masa penjajahan Belanda, banyak rakyat Indonesia yang menderita kelaparan, pendidikan yang rendah, dan juga matinya pendapatan mereka akibat ekonomi yang tidak sehat akibat sistem yang diterapkan Belanda. Beragam politik yang merendahkan kedudukan rakyat Indonesia menimbulkan kesengsaraan rakyat. Ketika tenaga mereka dipekerjakan tanpa henti sedangkan pendidikan serta upah mereka yang rendah menjadikan keadaan rakyat Indonesia sangat menyedihkan kala itu.

Penghidupan yang pas-pasan saat itu di perparah dengan adanya politik tanam paksa pada tahun 1830. Politik tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes Van Den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum (nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial.

Pada era tanam paksa tahun 1930 para penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding

sistem monopoli VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) yang saat itu bertugas sebagai badan perdagangan Belanda karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah Belanda yang membudakkan rakyat atau yang dikenal dengan sistem kerja rodi.

Selain harus bekerja bagi tanam paksa rakyat juga masih berkewajiban melaksanakan kerja rodi. Ada tiga macam Kerja Rodi yang menjadi kewajiban rakyat, yakni rodi untuk pemerintah, untuk kepala dan untuk desanya. Kerja rodi untuk pemerintah pun tanpa diberi upah apa-apa. Pendek kata rodi diminta memenuhi kebutuhan pemerinath dan pegawai-pegawainya. Periode dua puluh tahun pertama masa tanam paksa (1830-1850) merupakan periode yang paling berat (Daliman, 2012:36)".

Sistem yang memaksa pribumi mematuhi aturan untuk menanami kebun-kebun mereka dengan tanaman khusus ekspor oleh elit-elit Belanda yang berkuasa saat itu membuat perekonomian pribumi tidak bisa leluasa dalam mengolah lahan mereka sendiri. Keadaan tertindas juga sengsara menjadikan para petani seperti alat yang tidak berarti dimata para pemerintah Belanda dan berlaku sewenang wenang.

Petani yang pada zaman VOC wajib menjual komoditi tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia Belanda pada 1835 hingga 1940.

Kehidupan masyarakat yang semakin terhimpit membutuhkan dukungan serta perluasan ekonomi dimana mereka dapat tumbuh dan berkembang setidaknya sedikit lebih baik dengan pemberian hak tanam bagi para petani. Tahun 1848 lahirlah gagasan konstitusi liberal untuk meringankan tanah jajahan dimana pengurangan pemerintahan dalam perekonomian rakyat jajahan serta pembebasan terhadap pembatasan kepemilikan perusahaan swasta di Jawa dan Sunda, juga menjadi berakhirnya era tanam paksa.

Raffles sendiri menentang sistem VOC karena keyakinan-keyakinan politiknya, yang sekarang dapat disebut liberal, maupun karena berpendapat bahwa sistem eksploitasi seperti yang dipraktikkan oleh VOC tidak menguntungkan. Apa yang dikehendaknya sebagai pengganti sistem VOC adalah suatu sistem pertanian dimana para petani atas kehendak sendiri menanam tanaman dagangan (*cash crop*) yang dapat di ekspor ke luar negeri. Dalam hal ini, pemerintahan kolonial hanya berkewajiban untuk menciptakan segala pasar yang diperlukan guna merangsang para petani untuk menanam tanam-tanaman ekspor yang paling menguntungkan (Poesponegoro dk, 2008:346)".

Keadaan yang kacau ini berakhir dengan bencana kelaparan di Cirebon dan Jawa Tengah di tahun 1850 akibat kekurangan beras yang menipis dikarenakan penekanan pada komoditi ekspor Hindia Belanda.

Politik Kolonial Liberal tahun 1870 yang ada saat itu kembali gagal menangani kesejahteraan rakyat pribumi. Segala bentuk keuntungan yang ada di serahkan dan di raup oleh Belanda, pemilik modal dan pengusaha cina. Pengeksploitasian

atas hak semacam ini dirasakan rakyat Indonesia dalam kurun waktu yang lama.

Keadaan dimana penjajah makmur sedangkan para jajahannya menderita ini menimbulkan banyak kecaman dari Jajaran Elit maupun Ratu Belanda sendiri, sehingga pada pertengahan tahun 1902 atas izin Ratu Belanda diadakanlah penyelidikan kemakmuran rakyat jajahan *Mindere Wehaarts Commissie*.

Hal inilah yang nantinya banyak membantu keadaan rakyat Indonesia. Penerapan politik etis berupa peningkatan pendidikan, perbaikan ekonomi melalui pengolahan lahan yang cukup longgar dimanfaatkan untuk menyambung kehidupan sosial hingga ekonomi pribumi dalam kurun waktu 1902 hingga menjelang kemerdekaan Indonesia.

Ini menandai masa transisi dari politik liberal menuju apa yang oleh Belanda disebut politik etis, yang mirip dengan doktrin *The White Man's Burden* bagi Inggris" (Daliman, 2012:64). Argumen yang menyatakan pribumi harus mendapatkan keadaan yang pantas ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang di ajukan oleh Van Deventer. Dimana kejayaan dan kemakmuran Belanda diperoleh bukan hanya dari hasil kerja Belanda sendiri melainkan usaha dan kerja keras rakyat Indonesia.

Pencetus politik etis (politik balas budi) ini adalah Van Deventer. Van Deventer memperjuangkan nasib bangsa Indonesia dengan menulis karangan dalam majalah *De Gids* yang berjudul *Een Eereschuld/ Hutang Budi*. Van Deventer menjelaskan bahwa Belanda telah berhutang budi kepada rakyat Indonesia. Hutang budi itu harus

dikembalikan dengan memperbaiki nasib rakyat, mencerdaskan dan memakmurkan” (Amral Sjamsu, 1986:56).

Gagasan ini berdasarkan dari tulisannya yang berjudul “*Een Eereschuld*” (*Debt of Honour*) atau hutang budi dalam de Gids pada tahun 1899.

Kritikan kaum elit Belanda yang menyudutkan pihak pemerintahan Belanda menyebabkan goyahnya kedudukan pemerintah Belanda dalam memegang kekuasaan penuh terhadap rakyat jajahan mereka, sehingga pemberian hak dalam melenggangkan kemakmuran pribumi dalam mengolah lahan maupun mendapatkan pendidikan yang layak dianggap pantas dan setimpal dalam usaha yang diberikan Indonesia selama ini. Karya fenomenal yang diingat hingga saat ini juga berkaitan langsung dalam pelaksanaan kolonisasi di Indonesia yang dikemukakan dalam bentuk Novel sarkas karya Douwes Dekker yang kita kenal dengan *Max Havelaar*.

Keadaan pasar global yang menguntungkan pihak Belanda saat itu juga menjadi alasan kuat Belanda mau menyetujui gagasan itu, dimana komoditas ekspor yang meningkat akibat penanaman lahan oleh pribumi sehingga pribumi layak mendapatkan kepentingan juga dalam peningkatan mutu dalam kemakmuran, ketentraman serta kesejahteraan, hingga hal ini memicu lahirnya politik etis.

“Pemerintah Kolonial memperkenalkan kebijaksanaan baru yang disebut *ethische politiek* (*politik etis*). Van Deventer, yang terkenal karena ancaman-ancamannya terhadap kebijaksanaan Pemerintah Belanda di Kepulauan Indonesia, pernah menyarankan bahwa

pendidikan, irigasi, dan emigrasi dapat memperbaiki keadaan sosio-ekonomi di Jawa” (Joan Hardjono, 1982:1).

Gagasan transmigrasi berawal dari dikirimnya penduduk pulau Jawa yang telah mengalami kepadatan penduduk, sehingga kumpulan dari beberapa ratus kepala keluarga di kirim ke daerah luar pulau Jawa dengan maksud mengisi daerah baru yang belum terjamah pertanian dan perkebunannya secara luas. Pengisian daerah baru untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan secara tidak langsung memang meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan rakyat pribumi, namun tetap saja secara non eksplisit maksud dari *Trias politica* ini adalah tidak lain dan tidak bukan dimaksudkan demi memperlancar eksploitasi tenaga kerja, bahan makanan dan dukungan berupa pasukan tentara. Hal ini hanyalah kedok guna meredam kritikan para elit maupun menenangkan pribumi bahwa Belanda menepati janji mereka. Hal tersebut dapat dibuktikan dari penerapan pendidikan yang ada terdiri dari 2 jenis yang sangat diskriminatif yaitu untuk anak para pegawai negeri dan elit sedangkan yang satunya untuk umum. Nantinya daerah kolonisasi akan menjadi pusat ekonomi baru bagi Belanda dengan metode yang sama yaitu penanaman kembali komoditi ekspor mereka.

Pengajaran diberikan di sekolah kelas I kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berkedudukan atau berharta, di sekolah kelas II kepada anak-anak pribumi pada umumnya. (Poesponegoro dk, 2008:28)

Daerah yang dituju saat itu selain Deli Serdang adalah Lampung.

Lain tujuan dengan yang ada di Deli hanya sebagai pekerja, kolonisasi yang ada di Lampung dimaksudkan untuk benar-benar menetap.

Sejarah transmigrasi di Indonesia dimulai pada tahun 1905 ketika 155 keluarga petani dari Kedu dipindahkan ke desa baru yang didirikan dekat Gedong Tataan sebelah selatan dari Way Sekampung di Lampung Selatan. Pemilihan lokasi dan pemindahan para kolonis dilaksanakan oleh H.G. Heyting, yang ketika itu menjabat Asisten-Residen di Karesidenan Kedu. kemudian sebuah pemukiman kecil didirikan di Bengkulu pada tahun 1909, sedangkan pada tahun 1922 sebuah pemukiman yang lebih besar yang diberi nama Wonosobo didirikan dekat Kota Agung di Lampung Selatan (Joan Hardjono, 1982:1).

Demi memperlancar proses transmigrasi yang dilakukan oleh Belanda, penamaan daerah di Lampung disamakan dengan daerah awal mereka menetap dimaksudkan kenyamanan mereka akan kampung halaman. Seperti pembukaan lahan awal di Gedong Tataan yaitu Bagelen. Bagelen merupakan daerah karesidenan di Jawa tempat awal sebelum mereka dikirim. Pemilihan daerah Bagelen bukan hanya menjadi lahan ekonomi, tetapi juga menjadi awal dipilihnya lahan yang sesuai untuk perkebunan dan pertanian. Pada awal perkembangannya tiap kepala keluarga memiliki luas lahan yang diberikan pemerintah Belanda untuk mereka garap. Oleh sebab itu diharapkan tiap daerah terbagi dan memiliki pusat perkembangan perekonomiannya sendiri. “Tiga jaringan seluas lebih dari 71.000 hektare, begitu pula sebuah kota baru, Metro, dibangun di tengah

Karesidenan Lampung” (Patrice Levang, 2003:10). Tapi pada kenyataannya pada tahap awal pembukaan lahan mengalami kesulitan, hingga pada tahun 1930 telah banyak perkembangan yang terjadi hingga saat ini dari jumlah awal kolonis yang ada berkembang lagi hingga meluas ke berbagai lokasi lain khususnya di Lampung. Penerapan sistem politik etis mengalami perkembangan dalam bidang sosial ekonomi. Perkembangan yang terjadi meliputi transmigrasi, edukasi dan irigasi yang menyebabkan perkembangan mereka begitu kompleks sehingga penulis tertarik dalam merumuskan perkembangan yang terjadi di Lampung khususnya Bagelen sebagai tempat awal berkembangnya para rakyat kolonis.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bentuk-bentuk dan proses perkembangan sosial-ekonomi yang terjadi pada masyarakat kolonisasi Jawa di daerah Bagelen Lampung pada tahun 1905-1945?”.

METODE PENELITIAN

Metode dalam sebuah penelitian merupakan langkah yang sangat penting karena dengan metode dapat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan, jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan masalah (P.Joko Subagyo, 2006:1). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian historis.

Metode penelitian historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masalalu atau peninggalan-peninggalan, baik untuk memahami kejadian atas suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari keadaan masa sekarang maupun untuk memahami kejadian atau keadaan masalalu, selanjutnya kerap kali juga hasilnya dapat dipergunakan untuk meramalkan kejadian atau keadaan masa yang akan datang (Hadari Nawawi, 2001:79).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan dan teknik dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah data yang muncul berupa kata-kata bukan rangkaian angka, data tersebut dikumpulkan melalui cara atau teknik yang digunakan oleh penulis, apakah yang diperoleh dari hasil observasi dan siap untuk diproses (B Miles dan A Michael Huberman, 1992 : 15). Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Solidaritas Mekanis

Pada awal mula datangnya kolonis tiba di Bagelen Lampung masyarakat masih saling bahu membahu menopang kehidupan mereka di tanah baru seperti yang dikatakan Emile Durkheim adalah benar. Masyarakat masih bersifat tradisional, kesadaran mereka akan nilai-nilai kemasyarakatan sangat tinggi. Dibuktikan dengan diterapkannya politik etis mereka awalnya enggan untuk dikirim ke

daerah baru yang asing. Lama kelamaan mereka sadar jika mereka tidak menemukan sumber kehidupan baru mereka akan tertinggal di kampung halaman mereka. Dasar pemikiran kesadaran kolektif adalah diluar individu namun memiliki daya paksa terhadap individu-individu sebagai anggota masyarakat. Jika dilihat hanya melalui daya tarik individu akan kolonisasi jelas mereka akan enggan untuk dikirim ke Bagelen Lampung, namun jika kita melihat situasi saat itu di daerah asal mereka yang sudah padat dan tidak ada lagi daerah garapan serta iming-iming pemerintah Belanda dengan modal secara cuma-cuma selama pengiriman awal kolonis, maka jelas mereka melihat kolonisasi sebagai suatu peluang harapan hidup baru.

Awal pembukaan lahan jelas tingkat pembagian kerja yang rendah, karena mereka baru secara langsung berhadapan dengan lahan yang baru dibuka, penyesuaian diri terhadap karakter daerah Bagelen Lampung serta membuka aliran air sebagai sumber lahan mereka. Maka dari itu tahun-tahun awal kolonisasi lahan kerja sebagian besar adalah petani, peladang, penebang pohon dan pegawai kewedanan. Terlebih lagi pegawai kewedanan hanya dipegang oleh kaum pribumi keturunan non-kelas bawah.

Hukum representatif atau yang lebih kita kenal dengan unsur yang menentukan kebudayaan masih memiliki peran dominan dalam kehidupan masyarakat kolonis saat itu. Hal nyata yang terjadi adalah keadaan dimana masyarakat Jawa di Bagelen Lampung ketika sudah ada yang berhasil dalam menggarap lahan, beberapa dari mereka ada yang kembali ke Jawa. Hal ini

menunjukkan bahwa anggapan tentang merantau hanya menjadi awal penghidupan masih menjadi kebiasaan mereka. Masyarakat kolonis saat itu masih belum yakin tentang mengembangkan usaha mereka yang berhasil untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru. Selain itu bukti lainnya penamaan daerah Bagelen sendiri, mereka seolah olah berada di rumah sendiri setelah kolonisasi dilakukan tahun 1905. Kenyataannya hal yang membuat mereka merasa daerah Gedongtataan seolah rumah sendiri adalah keberhasilan mereka sendiri dalam beradaptasi dengan lingkungan baru.

Durkheim membangun sebuah kesimpulan bahwa eksistensi masyarakat tergantung pada konsensus moral. Ide bahwa konsensus moral adalah kondisi yang diperlukan bagi mewujudkan keteraturan sosial adalah salah satu postulat teori fungsional”(Durkheim, 1951:79). Penyelarasan pikiran dan perasaan disini sangat berpengaruh saat mereka menghuni Bagelen Lampung. Jika mereka tidak bisa saling berhubungan dengan penduduk asli saat itu maka akan terjadi masalah. Perbatasan daerah khusus kolonis dengan daerah adat saat itu mungkin menjadi hal yang tidak boleh dilanggar dan dihormati satu sama lain.

Masyarakat kolonisasi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selain mengandalkan lahan garapan mereka sendiri, mereka juga saling bekerja sama dengan penduduk asli sebagai buruh pemetik hasil panen seperti lada, kopi dan cengkeh. “Tambahan penghasilan di dapat mereka selain dari pertanian, juga dari upah memetik lada, menumbuk padi pada penduduk asli dsb” (Amral

Sjamsu,1956:24). Perluasan daerah kolonisasi hingga Way Sekampung atau yang sekarang masuk kedalam daerah Metro menandakan adanya hubungan sosial yang terjalin dan saling membutuhkan dalam keseharian.

2. Solidaritas Organik

Berbeda dengan solidaritas mekanis, solidaritas organik membawa masyarakat kolonis saat itu sudah mulai menuju ke tahapan perkembangan selanjutnya. Walaupun kesadaran kolektif mulai berkurang, masih ada nilai nilai tradisional yang masih melekat. Hal ini akibat dari pusat Kewedanan Gedongtataan saat itu yang berlokasi di Pringsewu. Daerah Bagelen Lampung hanya sebagai daerah awal dan ibu kota keresidenan yang berkembang hingga menuju bentuk industrial perkotaan hingga sekarang.

Jika kita melihat sudut pandang Durkheim bahwa solidaritas organik merupakan kelanjutan dari masyarakat tradisional yang mulai berkembang menuju kearah modern tentu hal ini berlaku. Namun karena adanya perluasan daerah Bagelen Lampung yang termasuk Gedongtataan, kebutuhan lapangan pekerjaan di Bagelen sendiri meningkat. Adanya masa pebawon atau kolonis baru yang bekerja pada kolonis yang lama sudah mulai adanya perluasan lapangan pekerjaan. Para kolonis lama sudah mampu membuka dagangan mereka sendiri di toko dekat pasar tradisional. “Kemakmuran rakyat kolonis ini dapat dilihat dari rumah-rumah mereka yang tadinya sederhana dan dari gedek, kebanyakan telah bertukar menjadi rumah kayu dan atap genteng. Di Wonokerto didirikan suatu pasar yang besar dan dekat pasar itu

beberapa kolonis lama mendirikan toko-toko” (Amral Sjamsu,1956:31).

Kemampuan ekonomi masyarakat kolonis saat itu jika tidak terjadi gagal panen mereka mampu produksi beras hingga memasarkan beras ke Jakarta pada tahun 1941. “...Adapun hasil pertanian yang berupa padi, dengan semakin luasnya tanah pertanian, tiap tahun makin besar jumlahnya. Dalam tahun 1936 untuk pertama kali beras dari daerah kolonisasi Lampung dikirimkan kepasar Jakarta. Dalam tahun-tahun sebelum itu, Karesidenan Lampung terpaksa memasukkan beras kedaerahnya, untuk mencukupi makanan penduduk”(data tentang situasi ekonomi di distrik Lampung dalam Amral Sjamsu,1956:11).

Berdasarkan bukti tersebut adanya solidaritas mekanis benar terjadi selama perkembangan daerah Bagelen Lampung. Mereka masih memiliki peranan penting dalam membangun daerah Bagelen Lampung sebagai awal mula kolonisasi pertama. Walaupun pusat keresidenan saat itu berlokasi di Pringsewu, perluasan daerah semakin membawa perkembangan ke arah modern. Tahapan yang terjadi walaupun sulit dan melalui beberapa tahun hingga membentuk Lampung yang sekarang berisikan bermacam suku yang heterogen sangat dipengaruhi oleh gagasan awal kolonisasi.

Hasil

Perubahan sistem pemerintahan serta pemberlakuan aturan aturan pada tahun 1905 menyebabkan banyak perubahan pola kehidupan masyarakat saat itu,dan yang paling berpengaruh ialah sosial ekonomi. Syarat mutlak tolok ukur perkembangan dalam segi sosial

ekonomi salah satunya adalah pendidikan. Berkaitan erat dengan sumbernya sendiri yaitu politik etis, pendidikan, pekerjaan dan ekonomi menjadi hal yang paling disorot,walaupun penyediaan sekolah untuk rakyat pribumi terlebih lagi kolonis sangat minim tetapi perkembangan yang ada mempengaruhi efek jangka panjang yaitu pendidikan keluarga berupa teknik pengolahan lahan dan berhitung yang di dapat dari generasi ke generasi serta sekolah sekolah umum walaupun hanya sekedar membaca.

Dilihat sejak masa kolonialisme, pendidikan dianggap sebagai faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Masyarakat Indonesia yang biasa dikenal dengan penduduk pribumi pada masa kolonial mendapat kesempatan untuk menyekolahkan anak-anaknya, meskipun masih banyak keterbatasan karena adanya pembedaan perlakuan dalam masyarakat, adanya perbedaan jenjang pendidikan pada masa kolonial pada umumnya membuat peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan lebih sedikit sehingga berdampak pada pendapatan yang mempengaruhi kesejahteraan. (Paulus Wirutomo. 2012. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta:Universitas Indonesia.60-65)

Penerapan sistem politik etis tahun 1905 juga menjadi acuan berkembangnya para kolonis yang ada di Lampung. Perkembangan awal berupa pembukaan lahan-lahan yang telah dibagikan sebesar $\frac{3}{4}$ bau sawah dan lahan serta dipinjamkannya modal beberapa gulden saat itu hanya berguna untuk membuka kesempatan dan memperluas cakupan kesejahteraan tetapi itu semua belum cukup.

Kesulitan akses, pemanfaatan usia yang produktif dan teknik pengolahan lahan yang benar belum memadai sehingga menyulitkan perkembangan para kolonis pada tahun-tahun awal mereka mendiami Bagelen Lampung sehingga keadaan sosial ekonomi yang ada saat itu hanya terbatas pada pertanian, berladang dan penyesuaian lahan garapan, pendidikan yang minim, serta pekerjaan yang minim. Pada tahun berikutnya yakni tahun 1906 pemerintah menurunkan kolonis gelombang kedua yang mengakibatkan penumpukan jumlah kolonis.

Tabel 1. Perkembangan Sosial-Ekonomi masyarakat kolonis Jawa di Bagelen Lampung

Tahun	Tingkat Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Aktivitas Ekonomi
1905	Sekolah-sekolah desa, pengetahuan dasar bertani melalui mantri kewedanan	Peladang, petani, mantri dan pegawai kewedanan, serta penebang pohon sebagai pembuka lahan dan hutan.	Mayoritas keadaan awal ekonomi rakyat menjual dan hanya memenuhi kebutuhan keseharian mereka.
1906	<i>Bagelen School</i> guna mendidik anak-anak dari kolonis(kaum pribumi	Munculnya tenaga medis akibat dari timbulnya penyakit disentri dan malaria.	Mereka masih beradaptasi dengan lingkungan sehingga belum mampu mendistribusi hasil garapan.

(Sumber : Data hasil penelitian)

Hanya bermodalkan kuantitas bukannya kualitas kolonis hanya semakin memperberat usaha mereka dalam menggarap lahan di Gedongtataan. Disini dampak secara langsung yang di rasakan para transmigran adalah kekurangan

pangan dan kualitas hidup yang kecil. Ketidakefektifan pemerintah saat itu yang tidak menyeleksi lahan secara mendetail dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tidak selektiflah yang membuat pelaksanaan kolonisasi tahun 1905 hingga gelombang kedua pada tahun 1908 dinyatakan gagal.

Dampak yang terjadi di Bagelen tidaklah instan, butuh anggaran yang banyak dan juga pemahaman tentang lahan serta pengairan yang tepat selama bertahun-tahun sehingga perluasan mulai di butuhkan dan merambah daerah lain di sekitar Bagelen dan mengarah ke selatan yaitu Pringsewu dan sekitarnya hingga daerah Metro. Pemerintah Hindia Belanda tidak berpuas hati dan terus melaksanakan perluasan hingga saat menjelang akhir periode kemerdekaan tetap di adakannya sistem politik balas budi, sebaliknya pemerintah Hindia Belanda harus berterima kasih kepada rakyat kolonisasi jika saja mereka tidak dapat bertahan dan keberadaan koloni di daerah baru lenyap maka bukan mencari solusi melainkan menambah kesengsaraan rakyat jajahannya.

Perkembangan Tingkat Pendidikan

Perkembangan tingkat pendidikan di wilayah kolonisasi Gedong Tataan adalah dibangunnya sarana pendidikan oleh Pemerintah Kolonial yaitu *Bagelen School*, sekolah desa setingkat sekolah dasar yang di peruntukan bagi anak-anak masyarakat setempat. Lalu ada sekolah-sekolah kecil di tiap-tiap desa. karena persebaran dan perluasan daerah baru, maka sekolah lanjutan lainnya berada di pusat kawedanan saat itu yang ada di

Pringsewu yaitu *Vervolgschool* yang diberi nama *Beda School* yang didirikan pada tahun 1932, kemudian Sr. M. Engelmunda Wouters mendirikan *Holland Inlandse School (HIS)*.

1. *Bagelen School*
2. *Beda School (Vervolgschool/* sekolah lanjutan),1932.
3. *Holland Inlandse School* (sejenis sekolah khusus).
4. Sekolah sekolah desa setingkat sekolah dasar di tiap desa Bagelen saat itu.

Tabel 2. Tabel Perkembangan Pendidikan

Tahun	Sarana Pendidikan	Jenis Pendidikan	Lokasi
1905 - 1910	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bagelen School</i> • Sekolah desa 	Pendidikan dasar Bercocok tanam	Bagelen
1911 - 1918	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bagelen School</i> • Sekolah desa 	Pendidikan dasar Bercocok tanam	Bagelen, Purworejo, Wonodadi
1919 - 1938	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bagelen School</i> • Sekolah desa • Sekolah Bumiput era kl. II 	Pendidikan dasar Bercocok tanam	Bagelen, Purworejo, Wonodadi (Bumiputera hanya ada di Bagelen saat itu)
1939 - 1945	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah Desa milik pemerintah dan Missie • 2 <i>Vervolgschool</i> • 1 kursus guru milik pemerintah • 1 kursus guru milik missie 	Sekolah umum (hanya sekolah desa) Sekolah khusus	Bagelen Gedongtatan (1 <i>Beda School</i> dan <i>HIS</i> terletak di Pringsewu karena pusat pemerintahan saat itu)

Tahun	Sarana Pendidikan	Jenis Pendidikan	Lokasi
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 <i>HIS(Holland Inlandische School)</i> 		

(Sumber : Data hasil penelitian)

Perkembangan Jenis Pekerjaan

Pada periode awal mereka mendiami daerah Bagelen usaha utama para kolonis adalah bertani dan beternak. Mereka mengandalkan modal utama yang diberikan pemerintah saat itu. Peralatan yang terbatas sebagai pengolah kebun, sawah dan lain-lain memaksa mereka di periode awal hanya bekerja sebagai petani. Lalu setelah pengiriman gelombang kedua pada tahun 1912 hingga penghujung masa kolonis mulai berkembang dan sudah secara pasti mereka memiliki pekerjaan yang tetap seperti pedagang hingga pegawai kewedanan. Sebagian pekerjaan yang diambil pada akhir tahun 1932 adalah sebagai pebawon atau yang lebih dikenal sebagai tenaga kerja kolonis baru yang bekerja pada kolonis lama.

1. Petani
2. Beternak
3. Pedagang
4. Pegawai Kewedanan
5. Pebawon (tenaga kerja kolonis baru pada kolonis lama).

Perkembangan Aktivitas Ekonomi

Perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat kolonis ditandai dengan pembukaan lahan selanjutnya mereka tentu saja membutuhkan alat alat bantu selain yang diberikan oleh pihak pemerintah kolonis, mereka mulai membuka usaha. Terbukti dengan adanya pasar yang menjual barang di

daerah rakyat kolonis. Mereka memulai dengan pertukaran kecil hingga pengerajin barang dan juga kebutuhan rumah tangga. Pasar yang ada tidak seperti pasar saat ini dimana mereka hanya bertukar barang /sistem barter. Lalu dibangunnya *Lampongsche Volksbank* di tahun 1911 merupakan tanda bahwa suatu daerah sudah memiliki kegiatan ekonomi yang kompleks. Walaupun maksud dari dibangunnya bank tersebut guna memperoleh keuntungan tetapi hal tersebut menandakan daerah kolonis sudah memiliki kegiatan ekonomi yang stabil. Walau hanya lingkup daerah kolonis Bagelen hingga keseluruhan daerah Gedong Tataan hingga sekitarnya.

Kolonisasi sistem bawon yang mendatangkan kolonis menjelang bulan panen ini menghidupi para kolonis baru dengan cara pemberian kerja menuai di lahan-lahan pertanian kolonis lama yang diupah secara natura,yaitu padi, dengan perbandingan 1 untuk penuai dan 7 untuk pemilik tanaman, malahan sampai 1 berbanding 5, sedangkan di Jawa hanya 1 berbanding 10. Dengan sistem ini, para kolonis baru dapat memulai hidup barunya disana secara lebih aman” (Ramadhan KH. 1993: hlm 45).

Pembukaan lahan yang dilakukan masyarakat koloni juga melalui sistem bawon mendukung adanya kegiatan ekonomi. Dimana ada usaha utama dan juga usaha sampingan hingga mereka mampu menyewa bawon. Bukti lainnya adalah perluasan daerah Pringsewu, sepanjang jalan ganjaran hingga ke arah tengah Lampung yaitu kalirejo hingga menyusuri aliran sungai Way Sekampung.

Perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat kolonis ditandai dengan pembukaan lahan selanjutnya mereka mulai membuka usaha. Aktifnya suatu aktivitas ekonomi ditandai dengan adanya kegiatan konsumsi, produksi dan distribusi terbukti dengan adanya pasar yang menjual barang di daerah rakyat kolonis. Mereka memulai dengan pertukaran-pertukaran kecil hingga pengerajin barang dan juga kebutuhan rumah tangga.

Pasar yang ada tidak seperti pasar saat ini dimana mereka hanya bertukar barang/ sistem barter. Berikut hasil perkembangannya.

1. Pengolahan lahan untuk disimpan dan konsumsi pribadi.
2. Produksi padi, rempah dan sayur guna dijual.
3. Pendistribusian hasil panen, lori ke daerah sekitar Bagelen.

Tabel 3. Perkembangan Aktivitas Ekonomi

Tahun	Aktivitas
1905 – 1911	Masa percobaan ✓ Modal kolonis secara Cuma–Cuma. ✓ Perekonomian masih fluktuatif. ✓ Hanya untuk memenuhi pangan sehari–hari dan pengolahan sendiri (konsumsi).
1912 – 1931	Masa pinjaman/hutang ✓ Perekonomian lesu akibat adanya target pajak ✓ Pembatasan modal dengan bunga yang besar tidak sesuai dengan hasil panen ✓ Usaha tani yang berhasil mampu mengembalikan modal, sedangkan yang tidak terpaksa membuka lahan garapan baru atau bekerja pada kolonis lain. ✓ Sudah ada penjualan hasil garapan ke daerah sekitar kolonis lain (produksi).

932 – 1942	Pebawon ✓ Kolonis baru banyak yang datang ke tanah sebrang tanpa adanya paksaan. ✓ Munculnya pebawon ✓ Daya beli melemah akibat Perang Dunia II ✓ Setelah ekonomi mula stabil banyak kolonis yang sukses hingga mampu mendistribusikan panennya hingga Jakarta.
------------	---

(Sumber : Data hasil penelitian)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan didapatkan bahwa Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Kolonisasi Jawa di Daerah Bagelen Lampung pada Tahun 1905-1945, antara lain :

1. Perkembangan tingkat pendidikan adalah didirikannya *Bagelen School*, sekolah desa dan sekolah tingkat 2 Bumiputera. Daerah pringsewu yang saat itu masuk kedalam daerah perluasan daerah Bagelen memiliki 2 sekolah utama yaitu *Vervolg school* yang diberi nama *Beda School* dan juga ada *Holland Inlandse School (HIS)*.
2. Perkembangan jenis pekerjaan adalah sudah adanya variasi pekerjaan selain petani, pedagang dan pegawai pemerintahan antara lain pedagang, bidan atau saat itu yang lebih dikenal dengan dukun beranak hingga pegawai jawatan umum. Pada akhir tahun 1932 sudah ada pebawon atau yang lebih dikenal sebagai tenaga kerja kolonis baru yang bekerja pada kolonis lama.
3. Perkembangan aktivitas ekonomi adalah adanya kegiatan konsumsi, produksi dan distribusi. Adanya Bank

Lampung yang dikelola oleh pemerintah Belanda dan juga akhir pengiriman sudah ada pasar rakyat serta meningkatnya sarana pertanian seperti lori atau peralatan berkebun guna meningkatkan produksi para kolonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Daliman, A. 2012. *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX : Sistem Politik Kolonial Dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Hardjono, Joan. 1982. *Transmigrasi Dari Kolonisasi Sampai Swakarsa*. Jakarta: PT Gramedia.
- Joko P. Subagyo. 2006. *Metode Penelitian : Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles Mattew B dan Michael Hoberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Patrice Levang. 2003. *Ayo Ke Tanah Sabrang, Transmigrasi Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Poesponegoro, Marwati Djoened. Nugroho Notokusanto. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV Kemunculan Penjajahan Di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sjamsu, Amral. 1986. *Dari Kolonisasi ke Transmigrasi 1905-1955*. Jakarta: Djambatan.